

PERAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL
DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

JUMAIDI HUSIN IRKAMI / 0901131757

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Fisip

DOSEN PEMBIMBING: Drs. Raja Muhammad Amin M.Si

Kampus Universitas Riau Bina Widya JL. HR. Soebrantas Km 12.5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293

(0761) 63277, 35675

ABSTRACT

This study , entitled The Role of Local Government in Rural Development in Sub Rupa Disadvantaged Bengkalis 2012. This research was motivated by Act No. 32 of 2004 on regional administration , which in the Act states that the development of the District and City organized with attention to the principles of democracy, community participation, equity and justice as well as attention to the potential diversity regional diversity. Law gives full autonomy to the District and the City to establish and implement policies and initiatives according to the aspirations of its people.

Problems contained in this sekripsi is still underdeveloped villages in the district Rupa Bengkalis in 2012. For this study aims to determine how the local government 's role in the development of underdeveloped villages, as well as to overcome the obstacles in the development of underdeveloped villages. Those used in this research method is a method that describes the qualitative descriptive data. Data collection techniques used are documentation and field study by interviewing while the data sources used is primary data obtained from the study sites and is supported by secondary data.

Based on the results of research conducted, Bengkalis government has done some role to promote development that improves the quality of education, economic infrastructure development, infrastructure development liaison, community empowerment and improved quality of plantation society, but not optimal in practice, because there are several factors inhibiting such limited sources of funding, poor quality of human resources, guidance and supervision is lacking and not well targeted aid that is given.

Keywords: Roles, Policies, Development, Local Government, Rural Disadvantaged.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disini pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya pada daerah untuk mengurus daerah sendiri sesuai budaya daerah setempat, tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara bangsa. Desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi Negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi. Partisipasi dan kemandirian di sini adalah berkaitan dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atas prakarsa sendiri yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Bambang Supriyono, 2005).

Peran pemerintahan daerah sangat penting dalam pengembangan desa tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di desa tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 19 tahun 2004 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis pasal 10 C Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok mengarahkan pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan sosial ekonomi perdesaan yang berguna untuk mengurangi jumlah desa tertinggal.

Di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis masih terdapat desa-desa yang tergolong dalam kategori desa-desa Tertinggal/Swadaya, dimana dari 8 desa terdapat 2 desa yg masih tertinggal, hal ini dibuktikan dari minimnya jumlah sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi darat yang kondisi jalan raya yang sangat rusak, Kecamatan Rupa berada di pulau Rupa untuk menempuh kesana bisa melewati penyeberangan dari Dumai yang jadwal keberangkatannya hanya dua kali sehari.

Tabel 1.1 Nama-nama Desa Tertinggal di Kecamatan Rupa 2012

NO	Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Status Desa
1	Hutan Panjang	73	2.900	Swadaya
2	Makeruh	151	4.735	Swadaya
Jumlah		224	7.635	-

Sumber : Kantor Camat Rupa 2012

Kriteria Desa Tertinggal yaitu :

- a. Daerah Pedesaan (unit administratif desa)
- b. Prasarana dasar wilayah kurang/tidak ada :
 - Air Bersih,
 - Listrik
 - Irigasi
- c. Sarana wilayah kurang/tidak ada :
 - Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)
 - Sarana Sosial: (kesehatan dan pendidikan)
 - Sarana Transportasi: (Terminal, stasiun, bandara, dll)
- d. Perekonomian masyarakat rendah (Miskin /Pra sejahtera).
- e. Tingkat pendidikan rendah (Terbelakang/Pendidikan kurang dari 9 tahun).
- f. Produktivitas Masyarakat rendah (pengangguran pada usia produktif).(Ani Anjayani 2007 : 24).

Desa tertinggal merupakan kawasan pedesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan). (ciptakarya.blog.spot)

Dalam upaya mengoptimalkan perannya, pemerintah daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam upaya percepatan pembangunan desa tertinggal, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerja sama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperan sebagai mitra konsultasi dalam proses percepatan pembangunan desa tertinggal.

Pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis ini sangat perlu ditingkatkan lagi karena pembangunan yang selama ini distortif, juga karena masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, seperti pendidikan dan keterampilan yang rendah. Disamping itu masyarakat desa tertinggal tersebut relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relative jarang sehingga potensinya untuk menjadi maju terhambat.

Pemerintahan daerah sangat di tuntut untuk mengatasi kesenjangan ini maka perlu dilakukan terobosan berupa program transmigrasi dan mobilitas penduduk yang memiliki seperangkat kegiatan, seperti: penataan ruang, penataan pemukiman penduduk, dan penyempurnaan sarana dan prasarana sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan. Pemerintah daerah juga perlu membimbing, mengontrol, dan memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa, agar bisa menepatkan Dana-dana yang di berikan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Pembiayaan untuk melaksanakan desa tertinggal dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Swasta dan Masyarakat. Desa tertinggal ini sebenarnya memiliki sumberdaya alam yang cukup kaya dan cukup bagus tetapi masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut, seperti :

1. Tanah yang begitu subur yang sangat bagus apabila dijadikan untuk lahan pertanian.
2. Pantai yang membentang begitu indah, apabila di kembangkan secara profesional akan sangat mungkin menjadi primadona kunjungan wisatawan baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional dengan melihat pada potensi yang ada. Di dukung oleh letak pantai yang strategis dan kondisi alam yang masih alami sangat memungkinkan pariwisata untuk berkembang pesat, yang mana nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta mengurangi angka pengangguran.. Namun sangat disayangkan sekali potensi wisata pantai tersebut belum di manfaatkan dengan sebaik-baiknya, hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya bangunan pemerintah.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah belakangan ini ternyata belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan, akibatnya adalah timbul desa-desa yang miskin dan terkebelakang.

Setelah melakukan observasi lapangan, peneliti menyimpulkan ada beberapa masalah yang ada di Desa-desa Tertinggal di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana seperti :
 - a. Jalan utama yang rusak, sehingga mempersulit akses masyarakat menuju area perkotaan.
 - b. Masih banyak Jalan-jalan tanah dan Jalan-jalan setapak sehingga mempersulit masyarakat menuju area pertanian yang berdampak sulitnya membawa hasil panen serta memasarkannya.
 - c. Masih ada desa-desa yang belum tersentuh oleh Jaringan listrik, sebagaimana kita ketahui di zaman sekarang listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Banyaknya jumlah pengangguran, kurangnya lapangan kerja di Desa sehingga membuat jumlah pengangguran meningkat.
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan , keterampilan dan pengetahuan seseorang akan bertambah.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dibidang pembangunan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, dimana pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan desa tertinggal, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu : ***“Peran Pemerintahan Daerah Dalam pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”***

B. Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena.

Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan terlebih dahulu, yakni mengenai peran pemerintahan daerah dalam pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, maka penulis akan mengemukakan konsep teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun konsep atau teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

2. Kebijakan

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah, dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan untuk memecahkan permasalahan. Pada prinsipnya, pihak-pihak yang membuat kebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dicapai melalui usaha bersama dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah perumusan kebijakan harus dilandasi dengan pengetahuan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi, permasalahan dan kemungkinan.

3. Pengawasan

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan ini perlu diawasi pelaksanaannya agar memberikan hasil secara optimal kepada masyarakat luas.

Menurut Nitisemito pengawasan dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang ditetapkan. Dengan pengawasan ini diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kemungkinan timbul kerugian berat dapat dihilangkan atau setidaknya dapat diperkecil. (Alex S Nitisemito, 1997:144). Pengawasan adalah proses pengawasan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian,1982:135)

4. Pembangunan

Pembangunan nasional merupakan suatu alternatif untuk mewujudkan amanat dan cita-cita bangsa, begitu juga dengan pembangunan desa. Pemerintah selaku aparat

yang bertugas melayani kepentingan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan program pembangunan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat..

Menurut Taliziduhu Ndraha (1987 : 46) yang mengatakan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka sumbangan kewajiban yang wajar antara pemerintah dengan masyarakat desa. Kewajiban itu adalah menyediakan prasarana, sarana, memberikan bimbingan dan pengawasan, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

5. Pemberdayaan Masyarakat

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan sebuah ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama *Penyadaran*, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ”sesuatu’, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun ”*demand*”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah *Pengkapasitasan*, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah *Pemberian Daya itu sendiri*, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Meleong, 1991:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan pengembangan Desa Tertinggal. Alasan pemeliharaan lokasi ini adalah dengan pertimbangan bahwa di kecamatan ini memiliki permasalahan yakni masih ada Desa-desa tertinggal dan terbelakang, kurangnya pengembangan pemerintah, tidak kreatif dan inovatif dalam membuat kebijakan untuk dapat mensejahterakan masyarakat di Desa-desa tertinggal ini.

2. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam pemerintahan daerah. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobability yaitu dengan cara *purposive sampling* hanya orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena yang terjadi. Untuk itu di butuhkan key person atau informan kunci sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian. **Yaitu** Bupati, kepala BAPPEDA, Kepala BPMPD, Camat Rupa (Eksekutif). Ketua DPRD (Legislatif) dan Kepala Desa.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan jawaban informan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui perpustakaan dan instansi/kantor yang berkaitan dengan tujuan perolehan data seperti data demografis dan data monografi kabupaten Lingga. Dari perpustakaan untuk mendapatkan teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala yang terjadi

5. Analisis data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu (P. Joko Subagyo, 2004:94).

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Rupat adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bengkalis, provinsi Riau, Indonesia. Tanjung kapal merupakan kelurahan yang cukup luas, merupakan bagian dari kecamatan Rupat yang terdiri dari beberapa wilayah yang biasa dibagi dalam beberapa rukun tetangga (RT)/ rukun warga (RW).

Dengan adanya roro membantu perkembangan yang terjadi pada daerah kelurahan tanjung kapal itu sendiri maupun daerah sekitarnya. Potensi wisata yang ada di daerah tanjung kapal masih belum dimaksimalkan oleh para penduduk maupun instansi pemerintahan yang berwenang pada wilayah tanjung kapal. Dapat dicontohkan adanya pantai yang menyisiri pantai di permukaan laut kelurahan tanjung kapal. Misalnya pantai parit joko yang berada pada dusun parit joko. Keunikan pantai ini adalah memiliki tumpukan pasir yang berada dipermukaan laut (selat) yang biasa dinamakan beting. Selain itu potensi wisata yang ada adalah wisata bahari dan hutan yang mengelilingi daerah tanjung kapal tersebut. Penghasilan utama dari daerah ini adalah perkebunan dan pertanian. Kecamatan Rupat merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupat terdiri dari 8 (delapan) desa dan 4 (empat) kelurahan dengan ibukota kecamatan berada di Batu Panjang. Secara geografis, Kecamatan Rupat berbatasan dengan:

1. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karna penduduk sumber daya manusia yang partisipasinya sangat di perlukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk juga sebagai objek dimana ia akan menjadi salah satu target dalam setiap proses pembangunan.

Tabel II.2 Jumlah pebduduk Menurut Jenis Kelamin pada desa-desa tertinggal di kecamatan Rupat 2012

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-laki	Perempuan
1	Makeruh	1.753	836	889
2	Hutan Panjang	3.395	1.632	1.763

Sumber : Kantor Camat Rupat 2012

3. Pendidkan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan.

Tabel II.4 Sekolah yang ada di desa tertinggal kecamatan rupat tahun 2012

No	Desa	Jumlah Sekolah	TK	SD	MDA	SLTP	SLTA
1	Makeruh	4	-	1	2	1	-
2	Hutan Panjang	4	-	2	1	1	-
	Jumlah	8	-	3	3	2	-

Sumber : Kantor Camat Rupat 2012

4. Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah kabupaten bengkalis sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten, jumlah serana kesehatan di kabupaten bengkalis pada tahun 2010 terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 6 unit, puskesmas 11 unit, pustu 52 unit, polindes 32 unit, serta poskedes 38 unit. Banyaknya tenaga medis dikabupaten bengkalis antara lain Dokter (Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi) 111 orang, bidan 283 Orang, dan perawat 520 Orang. Saat pemerintah konsentersasi dalam menangani bidang kesehatan.

Tabel II.5 Serana kesehatan dan tenaga medis di Desa Tertinggal Kecamatan Rupat Tahun 2012

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Dokter	Bidan	Bidan Kampung
1	Makeruh	-	-	1	1	-	1
2	Hutan Panjang	-	-	-	1	-	2
	Jumlah	-	-	1	2	-	3

Sumber : Kantor Camat Rupat 2012

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mencoba untuk menggambarkan lokasi dan inti penelitian secara umum. Ini di tunjukan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis isi dari peneltian ini nantinya. Adapun yang akan penulis gambarkan pada bab ini adalah peran pemerintah daerah dalam pengembangan desa tertinggal dan faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2012

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya penyelesaian permasalahan ketertinggalan dan keterpencilan didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Untuk menunjang upaya Pemerintah Kabupaten, seluruh potensi masyarakat yang tergabung dalam berbagai kelembagaan di daerah diharapkan ikut membantu. Hal ini sejalan

dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan seialigus sebagai manifestasi penerapan paradigma baru pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam paradigma baru yaitu penerapan konsep *good governance* dalam pembangunan, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dan kesejajaran peran antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis dijunjung tinggi. Dalam rangka mewujudkan kesejajaran masyarakat, dilakukan pemberdayaan dengan memberikan ruang untuk meningkatkan partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan data-data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun 2012. Sejalan dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah di Indonesia dituntut harus bisa mengurus rumah tangganya sendiri termasuk percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, maka penulis akan meninjau dari beberapa segi dengan menggabungkan beberapa teori seperti yang sudah penulis kemukakan pada BAB I di konsep teori, yakni :

1. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintahan daerah dalam pengembangan Desa Tertinggal ditempatkan pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pengembangan Desa Tertinggal. Untuk kepentingan dan tujuan tertentu, intervensi pemerintah terhadap pengembangan Desa Tertinggal dapat saja dilakukan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Intervensi yang dimaksudkan di sini adalah turut campur secara aktif dan bertanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunan desa. Dalam membuat kebijakan pembangunan desa pemerintahan daerah kabupaten bengkalis di harapkan harus lebih teliti, yang tidak mengusungkan konsep keseragaman karna tidak semua desa punya masaalah yang sama. Biasanya desa-desabyang jauh dari kota jauh tertinggal dibandingkan desa-desa yang dekat dari kota.

a. Kebijakan

Kecamatan Rupert sangat membutuhkan pembangunan yang begitu besar oleh karena itu perlu disusun suatu kebijakan pembangunan yang saling mendukung sesuai dengan potensi sumber daya alam seperti pengembangan pariwisata dan pembanguan sarana dan prasarana, yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah. Dari sudut inilah terdapat keterkaitan erat antara pemerintah selaku fasilitator, motivator dan mediator dengan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan melihat keterkaitan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkualitas dan produktif. Peran serta masyarakat didorong dengan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara sinergi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

b. Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan pemerataan penyebaran pembangunan nasional di seluruh wilayah tanah air sehingga terjadi keselarasan laju pertumbuhan antar daerah serta memperkuat kesatuan nasional dengan meningkatkan

ikatan ekonomi dan sosial antar wilayah. Dengan demikian diharapkan semangat dan gairah partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing akan semakin besar.

Pemerintah Daerah harus berperan dalam pengembangan Desa di Kecamatan Rupert yang mana pengembangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, dalam pengembangan melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa.

c. Pemberdayaan Masyarakat

pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama apabila kita tidak ingin melihat masyarakat semakin terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan hidup. Strategi pemberdayaan masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat perkotaan dan pedesaan berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat, pendekatan lintas sektoral dan program mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Rupert hendaknya dipahami bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai regulator dengan menjalankan fungsinya dalam bentuk pendampingan, bimbingan, dan perlindungan. Sementara itu, fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan harus melibatkan masyarakat secara luas.

d. Melakukan Pengawasan

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

Diharapkan DPRD Kabupaten Bengkalis mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah dalam pembangunan Desa di Kecamatan Rupert. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mengoptimalkan peran pemerintahan daerah dalam melakukan pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Rupert tahun

2012, adalah dengan melihat pengembangan melalui program-program yang harus ada dan langkah-langkah apa saja yang telah dilaksanakan.

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat

Sarana pendidikan masyarakat di desa tertinggal cenderung rendah. dimana masyarakat pada umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan.

Rendahnya pendidikan ini juga menjadi menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi

Pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan sumber daya alam secara optimal bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian dan industri yang menghasilkan komoditas unggulan daerah. Pengelolaan potensi ekonomi masyarakat ditunjukkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi, menaikkan kegiatan perdagangan lokal dan antar Daerah, terbentuknya jaringan pemasaran yang baik, serta memperluas kesempatan dan lapangan kerja. Sedangkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam ditunjukkan untuk memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan.

3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif(peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levey dan Loomba (1973), Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. definisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.

4. Pembangunan Infrastruktur Penghubung

Salah satu prasarana dan sarana pokok dan penting untuk membuka isolasi daerah desa Tertinggal dengan daerah lainnya adalah prasarana transportasi (seperti jalan raya, jembatan, prasarana transportasi laut, sungai dan udara), dan sarana transportasi (seperti mobil, sepeda motor, kapal laut, perahu mesin, pesawat udara dan sebagainya). Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang memadai akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke daerah pedesaan. Untuk mendorong peningkatan dinamika masyarakat daerah pedesaan akan arus transportasi orang dan barang keluar dan masuk dari dan ke daerah pedesaan, diperlukan prasarana dan sarana transportasi yang memadai.

5. Meningkatkan Kualitas Perkebunan Masyarakat

Karena minimnya pendidikan masyarakat menyebabkan penduduk desa di Kecamatan Rupert hampir 95% penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan. Dalam mengelola pertanian mereka hanya menggunakan cara-cara yang mereka terapkan selama ini secara turun temurun tanpa ada pembaharuan atau inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan hasil perkebunan mereka. Rencana Peningkatan Kualitas perkebunan merupakan bagian dari pembangunan bidang ekonomi dan bagian integral dari pembangunan daerah yang bertujuan meujudkan cita-cita nasional mencapai masyarakat adil dan makmur, sasaran pembangunan perkebunan dalam jangka panjang adalah menciptakan kekuatan dan kemampuan perkebunan yang tangguh.

B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal Di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkulu Tahun 2012

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Bengkulu tentang rencana pengembangan desa tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses implementasi kebijakan yang ideal adalah ter adanya interaksi dan reaksi dari kelompok pelaksana implementasi dan kelompok sasaran dari pengimplementasian peraturan itu sendiri. Ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Terbatasnya Sumber dana

Sumber dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan cukup memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) untuk melaksanakan pembangunan desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten /kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah Kabupaten/Kota. Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti dana INBUB, dan DAU dan DAK dan sumbangan dari pihak lain. Kekurangan pengawasan benar-benar mempengaruhi realisasi program yang memperlambat pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karna masih adanya penyalahgunaan dana inilah mengakibatkan terbatasnya dana dan mempengaruhi lajunya pembangunan desa itu sendiri.

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan, keterampilan dan pengetahuan seseorang akan bertambah, selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Dalam hal ini aparat desa yang memiliki skill yang baik dan profesional oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kemampuan teknis aparat masih perlu dibenahi, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang organisasi dan pemerintah secara umum masih kurang baik. masih rendah pemahaman masyarakat sehingga sulit dalam pembebasan lahan untuk perluasan jalan pembangunan jembatan, tidak adanya dukungan dari beberapa pihak sehingga program sulit teralisasi, serta kurang informasi dan tidak tepat sasaran bantuan yang diberikan untuk fakir miskin dan penyandang masalah kesosial lainnya.

3. Kurangnya monitoring dan evaluasi

Tujuan dilaksanakannya monitoring agar program-program yang di agendakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Monitoring dilaksanakan di semua tingkat. Dengan monitoring ini memungkinkan dilakukan penyempurnaan program dan diambilnya tindakan korektif apabila terdapat hambatan. Baik monitoring ataupun evaluasi merupakan alat analisis data dan menghasilkan informasi guna mengambil keputusan. Wujud nyata, dari monitoring dan evaluasi adalah laporan administratif, seperti laporan perkembangan fisik dan keuangan yang di lengkapi dengan analisis permasalahan secara mendalam. Laporan ini kemudian menjadi informasi dasar bagi evaluasi sewaktu program telah berjalan. Kemudian secara bersamaan antara monitoring dan evaluasi dengan dilengkapi data tentang status sosial ekonomi dan kesejahteraan kelompok akan menjadi informasi dasar bagi evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi membentuk sistem yang utuh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dengan data-data dan informasi yang terdapat pada bab-bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan tentang bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah cukup optimal, namun hasilnya masih belum memuaskan, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan hambatan-hambatan yang di hadapi dalam upaya pembangunan desa tertinggal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah

1. Upaya-upaya yang di lakukan :
 - a. Peningkatan kualitas Pendidikan
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ekonomi,
 - c. Pemberdayaan Masyarakat

- d. Pembangunan Infastruktur penghubung
 - e. Meningkatkan kualitas perkebunan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya Pembangunan Desa tertinggal oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah:
 - a. Terbatasnya Sumber dana
 - b. Rendahnya kualitas sumberdaya Manusia
 - c. Kuran
 - d. gnya monitoring dan evaluasi

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis hendaknya dapat melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pelatihan yang lebih kepada Pemerintah Desa.
2. Kerja sama tim harus ada pada kedua belch pihak, Pemerintah Daerah yaitu eksekutif dan legislatif, dan pemerintah Desa sebagai perangkat pendukung di Desa.
3. Konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan yang di mulai dari Visi dan Misi, dilanjutkan dengan strategi, kemudian implementasi, dan ditutup dengan kontrol atau pengendalian, plus semangat reinvensi disetiap womeen pembangunan. Konsistensi tidak identik dengan kekuatan namun justru dengan disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjayani, Ani. (2007). *desaku Masa Depan*. Klateen:Cempaka Putih
- J. Meleong, Lexi. (1991dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *pembangunan masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Bina Aksara, Jakarta
- Siagian, (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 19 Tahun 2004 Pasal 10 C, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- PP no. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.